

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL  
PENDIDIKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU  
PENDIDIKAN DI SD NEGERI 023898 BINJAI TIMUR**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

NURUL AULIA NASUTION

NPM : 1303100118

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**2017**

## PERNYATAAN

Bismillahirrahmannirahim

Dengan ini saya, Nurul Aulia Nasution NPM : 1303100118, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memasukkan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang dalam undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa hasil skripsi ini adalah hasil karya tulis saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat atau karya jiplakan orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan prang lain, kecuali yang secara tulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, April 2017  
Yang Menyatakan

Nurul Aulia Nasution

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SD NEGERI 023898 BINJAI TIMUR**

**NURUL AULIA NASUTION**  
**1303100118**

Standar Nasional Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 penyelenggaraan pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan serta mencakup sikap, moral dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program Standar Nasional Pendidikan. Program Standar Nasional Pendidikan memiliki tujuan utama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan Pendidikan Nasional yang bermutu. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Negeri 023898 Binjai Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Negeri 023898 Binjai Timur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif untuk mengulas lebih dalam kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di SD Negeri 023898 Binjai Timur. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tersebut sudah dijalankan. Namun, pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal dikarena kurangnya kualitas kinerja guru-guru baru, kapasitas kelas yang melebihi dan keterlambatan sarana dan fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah belum sesuai harapan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Maha Suci Allah SWT yang telah menganugerahkan setiap orang yang menjalani hidup di dunia ini berbeda-beda. Maha indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi yang beraneka rupa. Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas karunia, hidayah, dan anugerahnya lah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan dengan selesainya skripsi ini dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SD NEGERI 023898 BINJAI TIMUR. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia maupun akhirat.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril dan materiil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya ayahanda H. Syafaruddin Nst dan Ibunda Faridah terima kasih atas didikannya selama ini serta dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas perkuliahan ini.

2. Kepada Bapak Dr. Agussani, MAP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Ibu Nalil khairiah, S.IP. M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Drs. R. Kusnadi, M.AP selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku dosen pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Sempat Tarigan, S.Pd selaku kepala SD Negeri 023898 Binjai Timur dan Ibu Hasmah, A.Ma selaku guru serta staf-staf di SD Negeri 023898 Binjai Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
7. Seluruh Dosen dan staf-staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada Abang saya A. Hafis Nst, S.P. yang memberi arahan dan dukungannya selama ini.
9. Kepada Abang saya M. Arif Hidayat Nst, Adik saya Nurul Aini Nst dan kakak saya Astri Ramadhani A.Md yang tiada hentinya memberikan semangat selama ini.

10. Kepada sahabat saya Atikah Suri Hasmar A.Md dan Mirda Purnama Sari terima kasih banyak telah menenami dan membantu saya juga memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan dalam penulisan skripsi ini yaitu Putri Dhina Oktavia dan Tifanny Saskia faradhiba
12. Kepada seluruh keluarga besar saya yang tiada hentinya memberikan dukungan selama ini.
13. Dan kepada semua rekan-rekan seperjuangan fakultas FISIP UMSU angkatan 2013, mohon maaf bila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak di sengaja, terima kasih untuk semuanya.

Dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari pada kesalahan dan kekurangan, maka dari itu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenaan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Medan, April 2017

Penulis

Nurul Aulia Nst

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>7</b>
A. Implementasi Kebijakan Publik .....	7
1. Pengertian Implementasi .....	7
2. Pengertian Kebijakan .....	9
3. Pengertian Kebijakan Publik .....	10
4. Unsur-unsur Kebijakan .....	11
5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	12
6. Faktor-faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik .....	14
B. Konsep Pendidikan.....	16
1. Pengertian Pendidikan.....	16
2. Pengertian Kualitas Pendidikan.....	17
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan .....	18
4. Landasan Dan Asas Pendidikan.....	21
C. Mutu Pendidikan .....	22
1. Pengertian Mutu Pendidikan .....	22
2. Strategi Pengembangan Mutu.....	23
3. Pengawasan Mutu .....	24
D. Standar Nasional pendidikan .....	25
E. Pengertian Kebijakan Pendidikan .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Definisi Konsep.....	34
C. Kerangka Konsep .....	35
D. Kategorisasi .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	37

G. Narasumber.....	38
H. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Hasil Penelitian .....	60
B. Pembahasan .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 3.1 Kerangka Konsep .....	35
GAMBAR 3.2 Bagan Struktur organisasi Sekolah SD Negeri 023898 Binjai Timur .....	59

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 3.1 Status Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur.....	42
TABEL 3.2 Pihak Pengajar Dan Ketenagakerjaan Sekolah Menurut Golongan SD Negeri 023898 Binjai Timur .....	43
TABEL 4.1 Fasilitas Sekolah yang ada di SD Negeri 023898 Binjai Timur .....	61
TABEL 4.2 Keadaan SD Negeri 023898 Binjai Timur .....	61
TABEL 4.3 Data Siswa Berdasarkan Kelas Dan Jenis Kelamin.....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 .jo. peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013, penyelenggaraan pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan serta mencakup sikap, moral dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program Standar Nasional Pendidikan. Tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar Nasional Pendidikan menurut peraturan pemerintah tersebut dapat menyelenggarakan mutu pendidikan yang mengutamakan pendidikan yang berkualitas. Namun yang terjadi saat ini rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur ini diharapkan pihak-pihak yang terkait dengan keberhasilan Standar Nasional Pendidikan berperan aktif dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan yang di tentukan. Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur adalah salah satu sekolah yang memiliki akreditasi B yang perlu melakukan peningkatan mutu pendidikan, terutama pada standar proses

yaitu sekolah harus memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas anak didik dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta Psikologis anak didik. Dengan keluarnya peraturan pemerintah terbaru mengenai Standar Nasional Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi.

Kondisi mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan tentunya harus diperbaiki. Semua komponen yang terlibat baik dari internal sekolah maupun eksternal sekolah harus terlibat agar target mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Karena itu perlu adanya perubahan dalam tujuan pendidikan, mengubah pula *scope* atau luasnya tanggung jawab yang harus dipikul atau dilaksanakan oleh para pendidik. Hal ini mengubah pula bagaimana sifat-sifat kepemimpinan yang harus dijalankan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab sekolah dan guru-guru makin banyak dan luas. Jika dahulu kepala sekolah telah dianggap baik dan cukup kalau sekolahnya dapat berjalan dengan teratur tanpa menghiraukan kepentingan dan hubungan dengan masyarakat sekitarnya, maka penilaian sekarang harus lebih baik dari itu.

Tugas kewajiban administrasi pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur di samping mengatur jalannya sekolah, juga harus dapat bekerja sama dan berhubungan erat dengan sistem yang ada di masyarakat. Ia berkewajiban membangkitkan semangat staf guru-guru dan pegawai sekolah

untuk bekerja lebih baik. Membangun dan memelihara kekeluargaan, kekompakan dan persatuan antara guru-guru, pegawai dan murid-muridnya.

Standar Nasional Pendidikan yang diterapkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan harapan yang diinginkan, seperti standar isi, standar proses, standar kompetensi lulus, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar penilaian. Negara mencontohkan hal yang tidak terealisasikan pada sekolah dasar dan menengah di negara ini, dari Standar Pendidikan Nasional seperti standar proses yang terabaikan. Hal ini disebabkan rasio siswa idealnya 25 siswa perkelas sering melebihi kapasitas yang ditentukan sehingga tidak memaksimalkan aktivitas pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Bahkan di beberapa sekolah tidak jarang yang memiliki sedikit siswa. Pada standar kompetensi lulusan, dimana kriteria ketuntasan minimal yang penepatannya 7,5 adalah mustahil untuk diterapkan secara nasional karena bukan rahasia lagi jika tiga standar penilaian yaitu pemerataan fasilitas di sekolah seluruh Indonesia, pemerataan guru-guru terbaik dan evaluasi yang tidak sama sehingga tidak mungkin harus membuat siswa 75% mengerti semua pelajaran yang diberikan oleh guru. Pada standar sarana prasarana yang diisyaratkan adalah setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. Bahkan habis pakai serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana lahan, ruang kelas, ruang pemimpin, satuan pendidikan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel, ruang unit

produksi, ruang kantin instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah dan ruang-ruang pendukung lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar inilah yang paling bermasalah di Indonesia, karena jika dibangun di daerah terpencil akan membutuhkan dana yang tidak sedikit dan peralatan lain tidak lengkap, hal itu mengakibatkan siswa hanya menegtahui benda praktiknya hanya dilihat dari gambar saja dan tidak dalam bentuk nyata. Dimana siswa hanya disuguhkan pengetahuan kognitif saja untuk efektif dan psikomotoriknya tidak terpenuhi.

Masing-masing standar memiliki kekurangan dalam pelaksana dilapangan. Hal ini ditambahkan belum lagi terlaksana secara menyeluruh peraturan terdahulu yang telah dikeluarkan tetapi sudah keluar peraturan baru dan selalu berubah-ubah sehingga perlu waktu lagi untuk memahami dan menyesuaikan dengan perencanaan sebelumnya, serta masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan peraturan terbaru.

Dengan adanya masalah yang dihadapi saat ini tentang Standar Nasional Pendidikan diatas, maka Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Standar Nasional Pendidikan dengan judul : **“Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Negeri 023898 Binjai Timur”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Negeri 023898 Binjai Timur ?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Negeri 023898 Binjai Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam ilmu administrasi negara mengenai masalah-masalah yang terkait dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005
- c. Bagi instansi yang terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dan masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

## **D.Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini terdiri dari Pengertian Implementasi, Implementasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik, Pengertian Pendidikan, Mutu Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Narasumber, dan Lokasi Penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Implementasi Kebijakan Publik**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Menurut Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Wahab (2005:135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Winarno (2010:149) juga memberikan padangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Wahab (2005:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.



Menurut Susilo (2007:174) menyatakan implementasi merupakan suatu penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- a. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
- b. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata
- c. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- d. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

## **2. Pengertian Kebijakan**

Menurut Winarno (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif.

Menurut Dunn (2003:20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pengembangan perkantoran.

Menurut Wahab (2005:03) kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu.

Menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Di dalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tindakan menegerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.

### **3. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Abidin (2012:07) kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan “what goverment do or not to do” kebijakan dari pemerintahlah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Menurut Winarno (2010:29) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan-batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batas ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah. Disamping itu konsep ini mencakup tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Dimana suatu tindakan yang sebenarnya diluar dominan kebijakan publik.

Menurut Solly (2007:9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Agustino (2006:6) mendefenisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari uraian definisi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya di tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tidaklah efektif.

#### **4. Unsur-Unsur kebijakan Publik**

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan, formulasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu :

- a. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.
- b. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat

menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.

- c. Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
- d. Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
- e. Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana ini antara lain, kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

## **5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif

seperti undang-undang, peraturan daerah, dll. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai didalam konsep, tetapi muncul dilapangan.

Winarno (2002:102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Winarno (2014:148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai “to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakn publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pancapaina tujuan asli akhir (output) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

## **6. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik**

Widodo (2011:96) mengajukan 4 (empat) faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implelementasi kebijakan publik, diantaranya :

### **a. Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu menurut widodo (2011:97) komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

## b. Sumberdaya

Widodo (2011:98) mengemukakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai secara efektif maka implementasi kebijakan publik tersebut tidak akan efektif. Adapun yang mempengaruhi sumberdaya sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya :

### 1) Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia berhubungan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan kuantitas berhubungan dengan jumlah sumberdaya manusia.

### 2) Anggaran

Anggaran berhubungan dengan ketersediaan modal dalam pencapaian suatu kebijakan.

### 3) Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud disini seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran yang akan menunjang keberhasilan implementasi suatu program kebijakan

### 4) Informasi dan Kewenangan

Informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sedangkan kewenangan berperan



dalam menyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Perilaku

Sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan, namun tidak jika sebaliknya.

d. Struktur Birokrasi

Aspek struktur organisasi memiliki dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah memiliki standar operation procedur (SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak lari dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang akan menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

## **B. Konsep Pendidikan**

### **1. Pengertian Pendidikan**

Pendidikan pada dasarnya ialah sebuah kebutuhan yang begitu diperlukan oleh semua manusia tanpa terkecuali. Kemungkinan besar pendidikan itu merupakan suatu tanggung jawab dari orang tua kepada anak-anaknya dan negara kepada rakyatnya. Menurut Amri (2013:5) pendidikan diartikan :

- a. Serangkaian bentuk proses seseorang atau anak mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk lainnya yang bernilai ataupun berguna di masyarakat.
- b. Proses sosial dimana orang-orang atau anak-anak dipengaruhi dengan lingkungan yang (sengaja) dipilih dan dikendalikan (misalnya oleh guru di sekolah) sehingga mereka memperoleh kemampuan-kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal.

Menurut Amin dkk (2010:20) menyatakan pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat budaya serta kelembagaan sosial dari generasi kegenerasi.

Pendidikan dianggap begitu penting pada dewasa ini, sehingga pendidikan sangat berguna bagi masyarakat maju sehingga penulis mengambil kesimpulan pendidikan merupakan proses belajar yang bertujuan untuk dirinya dan bangsa agar dapat menjadi sumber daya yang unggul.

## **2. Pengertian Kualitas Pendidikan**

Kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya. Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentunya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-

guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru yang berpengalaman pensiun.

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan**

Ilmu pendidikan mengemukakan beberapa macam faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Para ahli pendidikan membagi beberapa faktor pendidikan tersebut, diantaranya :

#### **a. Faktor Pendidik**

Menurut Amri (2013:7) pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan atau kedewasaan seorang anak. Jadi sebenarnya seseorang disebut pendidik itu karena memiliki peran serta tanggung jawab terhadap peserta didik untuk dapat mendidik seorang anak.

#### **b. Faktor Anak Didik**

Menurut Amri (2013:9) sifat khas peserta didik ditemukan sebagai berikut :

- 1) Anak didik adalah seseorang yang belum dewasa atau belum memperoleh kedewasaan. Ia masih menjadi tanggung jawab seorang pendidik tertentu.

- 2) Anak didik adalah yang sedang berkembang, sejak ia lahir sampai meninggal, dan anak akan mengalami perkembangan karena itu pendidik harus membantu membimbing perkembangan anak baik perkembangan jiwa dan mental, pengetahuan dan pengawasan diri terhadap lingkungan sosialnya. Untuk itu maka setiap pendidik harus mengerti betul perkembangan kejiwaan anak.
- 3) Dasar hakiki anak didik adalah dapat di didik dan harus di didik. Amri (2013:9) menyatakan anak hakikatnya adalah makhluk yang dapat di didik, karena anak mempunyai bakat dan disposisi-disposisi yang memungkinkan pendidikan dan anak harus didik karena hakikatnya anak memiliki benih-benih sebagai makhluk susila tetapi tanpa pendidikan anak didik tidak mungkin memiliki pribadi susila.

#### c. Faktor Tujuan

Tujuan pendidik adalah faktor utama yang harus diperhatikan, dipergunakan oleh setiap pendidik yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan.

Ada dua faktor dari tujuan pendidikan diantaranya :

- 1) Hakikat tujuan pendidikan
- 2) Macam-macam tujuan pendidikan
  - a) Tujuan umum, tujuan umum ini juga disebut tujuan akhir atau tujuan keseluruhan yang sudah lengkap mau dibawa kemana pendidikan ini diselenggarakan.
  - b) Tujuan khusus, tujuan ini adalah pengkhususan dari tujuan umum dikarenakan untuk menuju kepada kondisi umum, perlu adanya tujuan

khusus yang akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu, seperti:

- 1) Cita-cita pembangunan suatu masyarakat atau bangsa
  - 2) Tugas suatu badan atau lembaga pendidik
  - 3) Bakat dan kemampuan anak didik
  - 4) Kesanggupan-kesanggupan yang ada pada pendidik
  - 5) Tingkat pendidik, dan sebagainya
- c) Tujuan seketika, dimana tujuan ini dikarenakan timbul secara kebetulan atau mendadak dan hanya bersifat sesaat.
- d) Tujuan sementara, tujuan ini merupakan tujuan pendidikan yang dicapai anak didik pada setiap fase perkembangan, contohnya anak dapat berhitung dan menjaga kebersihan dirinya.
- e) Tujuan tidak lengkap, tujuan ini erat hubungannya dengan aspek pendidikan yang akan membentuk aspek kepribadian manusia.
- f) Tujuan perantara, merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain.

#### d. Faktor Alat

Menurut Amri (2013:14) yang dimaksud faktor alat ialah segala sesuatu yang secara langsung membantu terlaksananya pendidikan.

Menurut Amri (2013:15) alat pendidikan terbagi atas dua golongan, yaitu :

- 1) Alat pendidikan prefetive yaitu alat yang bersifat pencegahan yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran proses pelaksanaan atau pencapaian tujuan pendidikan.

2) Alat pendidik refresif yang sering disebut alat pendidikan kuratif atau alat pendidik korektif. Alat pendidikan ini digunakan manakala anak melakukan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan atau anak melanggar ketentuan yang berlaku.

#### e. Faktor Lingkungan

Ki Hadjar Dewantara membagi faktor lingkungan menjadi tiga bagian, yang terkenal dengan istilah TRI PUSAT PENDIDIKAN yaitu tiga pusat pendidikan diantaranya : 1.Lingkungan keluarga; 2.Lingkungan sekolah; 3.Lingkungan masyarakat organisasi pemuda.

### **4. Landasan dan Asas Pendidikan**

#### a. Landasan Pendidikan

Menurut Amin dkk (2012:27) landasan pendidikan yang ada di Indonesia adalah :

- 1) Landasan filosofis, merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Landasan filosofis adalah Pancasila.
- 2) Landasan Psikologi, merupakan kondisi fisik dan psikis dari peserta didik. Pendidikan pada dasarnya membantu peserta didik untuk dapat menumbuh dan mengembangkan potensi secara optimal yang mana kegiatan itu lebih bertumpu pada psikologis peserta didik.
- 3) Landasan sosial dan budaya merupakan pendidikan sebagai gejala sosial dalam kehidupan mempunyai landasan sosial, individual, dan kultur.

- 4) Landasan hukum dalam pasal 2 undang-undang Republik Indonesia no 2 tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan Nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa perkembangan pendidikan adalah pengalaman pancasila, yaitu pancasila sebagai manusia pembangun yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri.
- 5) Landasan ilmiah dan teknologi, dunia pendidikan tidak dapat melepaskan dirinya dari dunia pengetahuan dan teknologi. Agar pendidikan dalam praktek terbebas dari keraguan-keraguan, ilmu pengetahuan dan teknologi sebisa mungkin dibawah ukuran-ukuran atau standar yang jelas.

#### b. Asas Pendidikan

Menurut Tirtarahardja dkk (2005:8) asas pendidikan tersebut adalah:

- 1) Asas tut wuri handayani
- 2) Asas belajar sepanjang hayat
- 3) Asas kemandirian dalam belajar

### **C. Mutu Pendidikan**

#### **1. Pengertian Mutu Pendidikan**

Menurut Depdiknas (2005:768) motto adalah baik atau buruknya suatu benda, kadar, taraf/drajat, misalnya kepandaian atau kecerdasan dan sebagainya. Secara umum kualitas atau mutu adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat.

Yaitu, mutu yang bersifat tangible dimana artinya dapat diamati dan dilihat dalam bentuk kualitas suatu benda atau dalam bentuk aktifitas. Menurut Subroto (2004:210) mutu dibedakan atas dua hal atau perilaku. Sedangkan mutu yang intangible adalah suatu kualitas yang tidak dapat secara langsung dilihat atau diamati, tetapi dapat dirasakan dan dialami. Misalnya disiplin, keakraban, kebersihan, dan sebagainya.

Sedangkan Garvin dan Davis (2005:15) menyebutkan bahwa mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen.

Amri (2013:18) mengatakan mutu dalam pendidikan bukanlah barang akan tetapi layanan, dimana mutu harus dapat memenuhi kebutuhan, harapan dan keinginan semua pihak/pemakai dengan fokus utamanya terletak pada peserta didik. Mutu pendidikan berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan hasil pendidikan yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang melekat pada wujud pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

Dari uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan tercapainya kualitas maupun kuantitas yang diharapkan agar masyarakat merasa puas.

## **2. Strategi Pengembangan Mutu**

Kekuatan dalam melakukan perubahan dapat memperlihatkan fenomena yang harus berkelanjutan dalam pemenuhan akan perubahan tersebut. Akhirnya



akan mendorong dalam upaya pemilihan strategi yang dapat diterapkan pada kondisi-kondisi yang terduga maupun yang tidak terduga yang kemudian akan muncul. Keberhasilan strategi sangat bergantung pada kemampuan dalam kepemimpinan untuk berani membuat komitmen, menghubungkan strategi dan visi yang tetap mengatur sumber-sumber yang mendukung terlaksananya strategi.

Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan analisi SWOT. Dimana S merupakan strength yang berarti kekuatan seperti beberapa guru sudah mulai melanjutkan jenjang star satu, W merupakan Weakness yang berarti kelemahan seperti sarana prasarana dalam kondisi yang sudah tua, O sertifikasi guru yang berguna untuk meningkatkan kinerja guru dan T merupakan threat yang berarti ancaman seperti adanya ketimpangan pembangunan antara sekolah daerah pinggiran kota dengan daerah kota. Tujuan analisis ini untuk mengetahui posisi sekolah, apakah sudah maju atau masih tertinggal dalam mutu pendidikan.

### **3. Pengawasan Mutu**

Pengawasan mutu pendidikan agar dapat dilaksanakan sejak input/masukan (siswa) masuk sekolah, mengikuti proses belajar mengajar disekolah dan hingga menjadi lulusan dengan berbagai kompetensi yang dimiliki.

Menurut Amri (2013:21) untuk melihat perkembangan pendidikan di sekolah, kepala sekolah dan staf guru-gurunya dapat memanfaatkan data yang ada di sekolah yang berhubungan dengan mutu sekolah dan mengolahnya menjadi diagram, tukar pikiran menggunakan statistik mutu yang memuat informasi

tentang rata-rata mutu pendidikan, standar deviasi/simpangan baku dari mutu pendidikan di sekolah.

#### **D. Standar Nasional Pendidikan**

Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia. Sehingga dengan adanya Standar Nasional Pendidikan maka negara secara langsung mewajibkan setiap sekolah yang ada di wilayah negara indonesia untuk patuh dan taat terhadap ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah dalam rangka meratakan kriteria minimal pendidikan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Standar Nasional Pendidikan terdiri dari 8 kriteria, yaitu :

##### **1. Standar Kompetensi Lulusan**

Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut.

## 2. Standar Isi

Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Standar isi kesetaraan pendidikan program paket.

## 3. Standar Proses Pendidikan

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

## 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik

yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki imprasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel, ruang kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang diatur dan berkelanjutan.

#### 6. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yaitu :

- a) Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan
- b) Standar pengelolaan oleh pemerintahan daerah
- c) Standar pengelolaan oleh pemerintah

#### 7. Standar Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas :

- a) Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

- b) Biaya personal sebagaimana dimaksudkan pada diatas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- c) Biaya operasi satuan pendidikan meliputi : gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan, sarana, dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

#### 8. Standar Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas : penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :

- a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik
- b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
- c) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah

#### **E. Pengertian Kebijakan Pendidikan**

Menurut Nugroho (2008:36) Kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2008:36) kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam

persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan landasan kebijakan pendidikan merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkan suatu aturan dalam bidang pendidikan agar tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan.

#### 1. Kebijakan-kebijakan Umum

Secara umum kebijakan pemerintah tertuang dalam, UUD 1945 yaitu pasal 28 dan pasal 31. Bunyi pasal 28 huruf c adalah sebagai berikut : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Sedangkan dalam pasal 28 huruf e disebutkan sebagai berikut : “Setiap orang bebas memeluk agama, dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Dalam pasal 31 dikatakan sebagai berikut :

- a) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
- b) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

- d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan, Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Dari beberapa pasal diatas, tampak jelas bahwa pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan diutamakan dalam pembangunan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, bahkan menjadi suatu kewajiban terutama pendidikan dasar. Sebagai konsekuensinya pemerintah wajib pula membiayainya dengan anggaran yang diprioritaskan. Selain pembiayaan pemerintah melakukan program-program atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan baik mutu maupun jumlah. Sehingga apapun bentuknya akan dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan partisipasi belajar peserta didik asal sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya komitmen pemerintah, diharapkan masyarakat atau warga akan mendapatkan kesempatan belajar.

## 2. Arah Kebijakan Pendidikan Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia

Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

- b) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidikan mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- c) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional
- d) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
- e) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- f) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- g) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sendiri mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif



oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.

- h) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.
- i) Aplikasi penerapan kebijakan pendidikan dalam pengembangan ilmu teknologi pendidikan di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Demikianlah menurut Moleong (2007:103) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap maknanya yang tersirat dalam dokumen.

Arikunto (2010:10) mengatakan agar penelitian dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data dalam bentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis.

## **B. Definisi Konsep**

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak ; kejadian keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

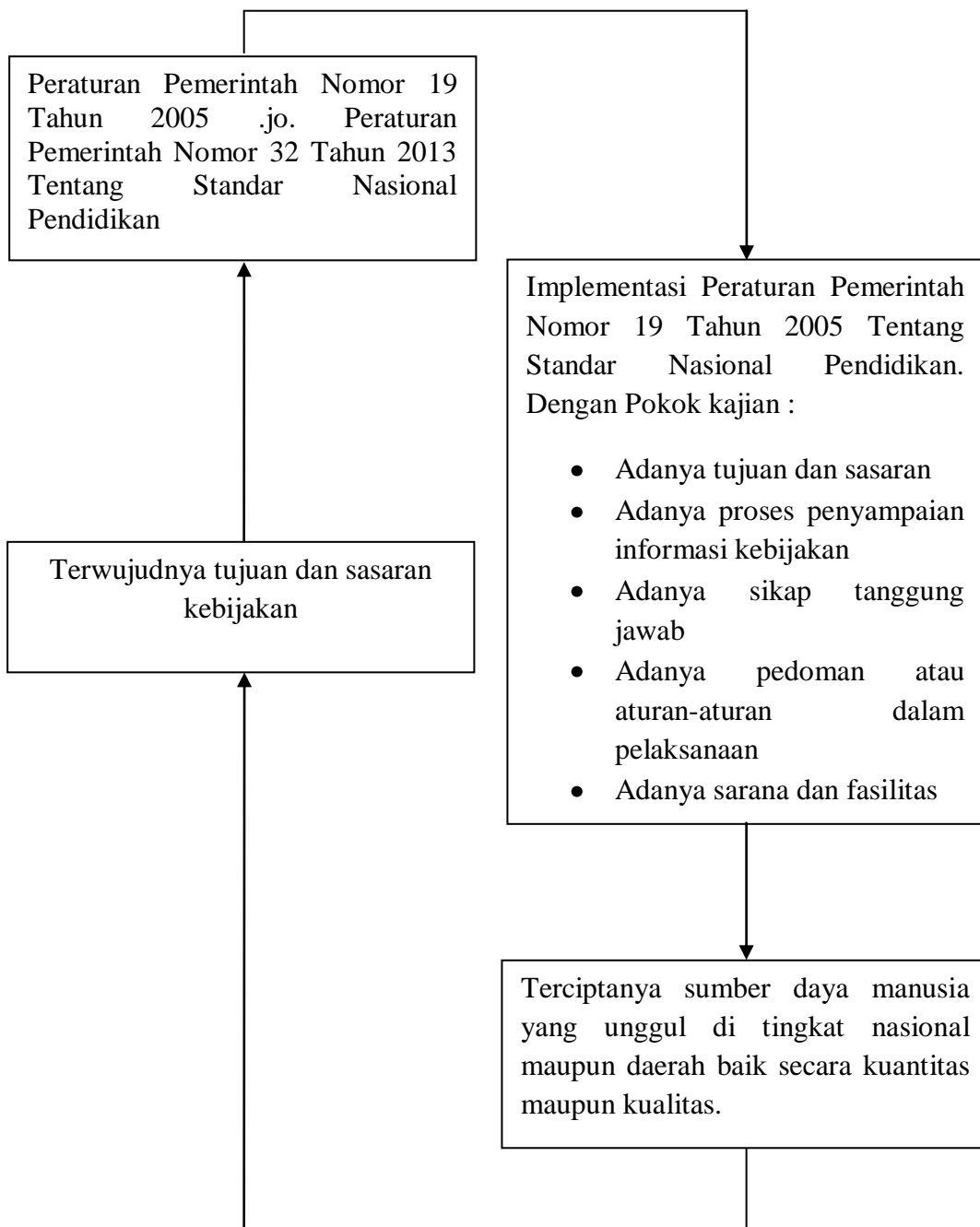
1. Implementasi merupakan berbagai pelaksanaan dari berbagai peraturan yang harus dilaksanakan demi mencapai hasil yang diharapkan yang berdampak baik kepada kehidupan kedepannya.
2. Kebijakan adalah tindakan dari sejumlah aktor yang bertujuan untuk pemecahan masalah yang ada di kehidupan sosial masyarakat.
3. Kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan batasan-batasan di kehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku di dalam masyarakat.
4. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundang-undangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu di dalam tatanan hidup masyarakat.
5. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Mutu pendidikan merupakan tercapainya kualitas maupun kuantitas yang diharapkan agar masyarakat merasa puas.

### C. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

#### KERANGKA KONSEP



#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau kriteria tertentu kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan peraturan pemerintah
2. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
3. Adanya sikap yang bertanggung jawab dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik.
4. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.
5. Adanya sarana dan fasilitas pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh dengan cara wawancara dengan informasi yang telah ditentukan.

## 2. Data Sekunder

Melalui studi Kepustakaan Peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang di peroleh dari buku dan referensi buku, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan batuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar.

Menurut Bungin (2012:196) analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh penelitian melalui perangkat metodologi tertentu.

Analisis data dimulai dengan mencari data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumentasi, gambar, dan sebagainya.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian

diinterpretasikan guna memberi gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan

### **G. Narasumber**

Narasumber dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah SD Negeri 023898

Nama : Sempat Tarigan ,S.Pd.

Umur : 52 tahun

Pendidikan : S1

2. Tata Usaha SD Negeri 023898

Nama : Henny Puspa Sari ,S.Pd.I

Umur : 25 Tahun

Pendidikan : S1

3. Guru SD Negeri 023898

Nama : Masriani ,S.Pd.SD

Umur : 50 Tahun

Pendidikan : S1

4. Guru SD Negeri 023898

Nama : Hasmah ,A.Ma

Umur : 54 Tahun

Pendidikan : D2

## 5. Orang tua siswa SD Negeri 023898

Nama : Sri Ratmini  
Umur : 45 Tahun  
Pendidikan : SMA

## **H. Deskripsi Lokasi Penelitian**

### **1. Sejarah Singkat SD Negeri 023898 Binjai Timur**

Hampir sebagian besar orang tua berusaha mencari lembaga pendidikan yang kondusif terhadap anaknya terutama pendidikan dasar. Hal ini dilakukan karena pendidikan anak pada tingkat dasar menjadi bagian terpenting dalam proses perjalanan masa depan anak yang akan dijalani anak yang mampu menjawab segala tantangan zaman dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang akan datang. Namun dalam pencarian lembaga pendidikan tersebut, orang tua diharapkan dapat mempelajari dan melihat langsung keberadaan sekolah tersebut. Baik dari segi sarana, fasilitas, tujuan, kurikulum maupun tenaga pengajarnya.

Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur yang berada di Jalan Ir. H. Juanda Kec. Binjai Timur Kota Binjai ini berdiri pada tanggal 01 Januari 1975 tanggal SK izin beroperasi 14 Januari 1975, pada awal tahun berdirinya SD Negeri 023898 Binjai Timur ini dengan keadaan yang memprihatinkan sebab dulunya sekolah tersebut adalah bekas garasi mobil-mobil sehingga saat di jadikan sekolah sekolah tersebut tidak sepenuhnya seperti sekolah biasa, lantai masih beralaskan tanah dan setiap kelas memiliki keadaan yang memprihatinkan. Setiap



ruangan kelas berdindingkan kayu–kayu, sehingga kelas yang lain dapat melihat karena hanya di batasi oleh papan–papan kayu yang di susun rapi. Di lihat dari luar SD Negeri 023898 Binjai Timur hanyalah sekolah biasa seperti sekolah–sekolah lainnya, namun kalau di lihat dari dalam sangat memprihatinkan. Terkadang setiap hujan turun ada berapa kelas yang atapnya bocor sehingga keadaan belajar pun terganggu, sehingga saat itu di buatlah jadwal sekolah untuk masuk pagi dan siang sehingga belajar dan mengajar pun tidak terganggu. Bangku dan meja setiap kelas sangatlah kurang sehingga murid–murid duduk di bangku panjang yang seharusnya untuk berdua namun dengan keadaan yang kurang dibuat tiga murid dalam satu bangku panjang. Pada tahun 1985 bantuan dari pemerintah pun datang sehingga satu persatu kelas dan lingkungan sekolah di perbaiki, mulai dari lantainya, atas kelas yang bocor, dinding sekolah, sampai papan tulis. Perubahan demi perubahan dibuat untuk sekolah SD Negeri 023898 Binjai Timur sehingga di tahun 1995 satu persatu murid datang untuk mendaftar di sekolah tersebut. Sehingga saat itu SD Negeri 023898 Binjai Timur memiliki murid yang cukup banyak di masa itu.

Tahun demi tahun di lalui namun keadaan sekolah terus memiliki perubahan sampai akhirnya sekolah tersebut menjadi sekolah yang di kenal banyak orang karena penghijauan di sekolah tersebut, pada saat itu sekolah tersebut banyak menanam pohon–pohon di sekitar lingkungan sekolah. Sekolah tersebut di perbaharui begitu pula kepala sekolahnya, setiap kepala sekolah memiliki visi dan misi untuk merubah sekolah tersebut menjadi lebih baik hingga di tahun 2010 SD Negeri 032898 memiliki catatan prestasi sekolah terbersih di

Binjai Timur hingga saat ini pun sekolah tersebut memiliki keadaan yang begitu baik dari sebelumnya, sekarang sekolah tersebut di tanami pepohonan dan buah-buahan sehingga para murid tidak hanya belajar di kelas namun mereka bisa mengenal nama pepohonan dan buah-buahan dan mereka dapat merawatnya dengan baik, tidak hanya itu di SD Negeri 023898 Binjai Timur tersebut juga di buat kolam ikan.

Dengan kurikulum yang baru dan kepala sekolah yang baru juga mereka setiap hari dan setiap pagi selalu membuat aktivitas yang bermanfaat yang nantinya akan menambah akhlak dan menambah wawasan mereka.

#### **Jadwal Kegiatan SD Negeri 023898 Binjai Timur**

<b>Senin</b>	<b>Selasa</b>	<b>Rabu</b>	<b>Kamis</b>	<b>Jum'at</b>	<b>Sabtu</b>
Upacara	Senam pagi	Senam pagi	Membaca di halaman sekolah	Gerak Jalan keliling Lingkungan sekolah	Shalat Duha (untuk Islam) Kebaktian (Untuk Kristen)

Setiap guru yang mengajar di SD Negeri 023898 Binjai Timur memiliki kualitas tersendiri, sehingga murid-murid dapat belajar dan mengerti pelajaran dengan mudah. Guru-guru SD Negeri 023898 Binjai Timur rata-rata sudah bersertifikasi oleh dinas dan Sarjana namun dengan sudah banyaknya guru-guru yang berpengsian di angkatlah guru honor di SD Negeri 023898 Binjai Timur, ada 3 orang guru honor di SD Negeri 023898 Binjai Timur yang mereka walaupun

guru honor dan di gaji pas-pasan tetap mereka juga mengajar dengan sungguh-sungguh sehingga banyak dari murid tersebut yang mengerti saat guru tersebut mengajar.

Sekolah Dasar Negeri 023898 Jl. Ir.juanda, RT/RW 0/0, Dsn. Timbang Langkat, Ds./Kel Timbang Langkat, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara memiliki Izin Status Pemerintah Pusat, dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 10211524 dan mendapat Akreditasi B untuk sekolah Dasar Negeri 023898 ini.

Adapun status Sekolah Dasar Negeri 023898 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**

**Status Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur**

<b>Status Kepemilikan</b>	Pemerintah Pusat
<b>Naungan</b>	Kementerian pendidikan dan kebudayaan
<b>Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)</b>	10211524
<b>Status</b>	Negeri
<b>SK Pendirian Sekolah</b>	425.11-06/SD/1975
<b>Tanggal SK Izin Operasional</b>	1987-01-14
<b>SK Izin Operasional</b>	425.11-06/SD/1957

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur 2016/2017

**Tabel 3.2**

**Pihak Pengajar/Ketenagaan sekolah menurut golongan di SD Negeri 023898**

**Binjai Timur**

<b>Tenaga Administrasi Non PNS</b>	1
<b>Guru PNS</b>	8
<b>Guru Non PNS</b>	3
<b>Kepala Sekolah</b>	1

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur 2016/2017

## **2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah**

### **a. Visi**

Mewujudkan sekolah berprestasi, mencintai lingkungan yang asri dan kreatif berdasarkan iman dan taqwa.

### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien
- 2) Meningkatkan kegiatan dalam mencapai prestasi
- 3) Meningkatkan kegiatan belajar mengajar dengan intensif
- 4) Menjaga lingkungan sekolah agar tetap terlihat hijau
- 5) Menjaga kelestarian lingkungan hidup sehat dan bersih
- 6) Meningkatkan kegiatan olahraga dan seni
- 7) Membekali siswa dengan nilai-nilai keagamaan/keimanan
- 8) Melaksanakan lomba ujian di sekolah

### **c. Tujuan Sekolah**

#### 1) Tujuan Umum Pendidikan

Agar siswa memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur, serta kemampuan dasar baca, tulis, hitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi

#### 2) Tujuan Khusus Pendidikan SD Negeri 023898 Binjai Timur

- a) Siswa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
- b) Siswa mempunyai dasar-dasar pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi
- c) Mengetahui dan mencintai bangsa, masyarakat dan kebudayaannya
- d) Siswa kreatif, terampil dan bekerja keras untuk dapat mengembangkan diri secara terus-menerus.
- e) Siswa sehat rohani dan jasmani.

## **2. Bagan Struktur Organisasi Sekolah**

Pihak-pihak yang mengelola dalam suatu organisasi diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi struktur merupakan hasil proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas

wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas bersama-sama secara harmonis.

Setiap organisasi baik yang besar maupun yang kecil harus mempunyai struktur organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan keadaan yang berlaku di organisasi tersebut. Struktur organisasi dibentuk menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efektifitas kerja. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang bekerja dan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan dalam organisasi.

Berdasarkan struktur organisasi, penulis melihat bahwa di SD Negeri 023898 Binjai Timur ini menetapkan bentuk struktur organisasi garis, yang menggambarkan hubungan antara bagian secara vertical. Oleh karena itu para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggung jawaban diberikan sesuai dengan instruksi atasannya. Sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan pengalihan wewenang terhadap bawahan.

Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagan organisasi juga dengan mudah dilihat banyak organisasi, jenjang dari

masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi penting mengingat pembentukan organisasi yang akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara suatu bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas menengah maupun tingkat bawah. Suatu organisasi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang akan dilakukan.

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka kegiatan organisasi yang menentukan dan memperjelas tentang pembagian tugas atau pekerjaan, pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem komunikasi yang sesuai sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik.

Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya :

- 1) Menghindari terjadinya konflik dalam pelaksanaan kerja
- 2) Adanya ketegasan dan tanggung jawab dari masing-masing aparat.

Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuklah bagan struktur susunan organisasi Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur secara hirarkis kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha, unit perpustakaan, kelompok jabatan fungsional (guru) dan siswa.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah**

Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah juga harus mengacu pada Permendiknas No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Sekolah, meliputi :

- 1) Perancangan program
- 2) Pelaksanaan rencana kerja
- 3) Pengawasan dan evaluasi
- 4) Kepemimpinan sekolah
- 5) Sistem informasi sekolah

Berdasarkan Permendiknas No.28 Tahun 2010 Tentang Pengasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa penilaian kinerja kepala sekolah, meliputi :

- 1) Usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah.
- 2) Peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan, dan
- 3) Usaha pengembangan profesional sebagai kepala sekolah.

#### **Berikut ini Tugas pokok dan Fungsi Kepala Sekolah**

##### **a. Perencanaan Program, meliputi :**

- 1) Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah
- 2) Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi sekolah
- 3) Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah



- 4) Membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
- 5) Membuat perencanaan program induksi

**b. Pelaksanaan Rencana Kerja, meliputi :**

- 1) Menyusun pedoman kerja
- 2) Menyusun struktur organisasi sekolah
- 3) Menyusun jadwal pelaksanaan kerja sekolah per semester dan tahunan
- 4) Menyusun pengelolaan kesiswaan yang meliputi : melaksanakan penerimaan didik baru, memberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk para peserta didik, melakukan pelacakan kepada alumni
- 5) Menyusun KTSP, kalender pendidikan dan kegiatan pembelajaran
- 6) Mengelola pendidik dan tenaga kependidikan
- 7) Mengelola sarana dan prasarana
- 8) Membimbing guru pemula
- 9) Mengelola keuangan dan pembiayaan
- 10) Mengelola budaya dan lingkungan sekolah
- 11) Memberdayakan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah
- 12) Melaksanakan program induksi

**c. Supervisi dan Evaluasi, meliputi sebagai berikut :**

- 1) Melaksanakan program supervisi
- 2) Melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
- 3) Melaksanakan evaluasi dan pengembangan KTPS
- 4) Mengevaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
- 5) Menyiapkan kelengkapan akreditasi sekolah

**d. Kepemimpinan Sekolah, meliputi sebagai berikut :**

- 1) Menjabarkan visi kedalam misi target mutu
- 2) Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai
- 3) Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah
- 4) Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu
- 5) Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah
- 6) Melibatkan guru dan komite sekolah dalam pengambilan keputusan harus melibatkan penyelenggaraan sekolah
- 7) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat
- 8) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan kode etik
- 9) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik

- 10) Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum
- 11) Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah
- 12) Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, Dan melaksanakan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah
- 13) Membantu, membina dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar pendidikan dan pertumbuhan profesional para guru dan tanggal kependidikan
- 14) Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat efisien dan efektif
- 15) Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat
- 16) Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab
- 17) Mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepala sekolah sesuai dengan bidangnya.
- 18) Merencanakan pelaksanaan program induksi guru pemula di sekolah, dst

**e. Sistem Informasi Sekolah**

- 1) Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dengan membangun budaya sekolah untuk menciptakan suasana yang kompetitif bagi siswa, rasa tanggung

jawab, bagi guru dan karyawan, menimbulkan rasa nyaman dalam bekerja dan belajar, menumbuhkan kesadaran tentang arti penting kemajuan, dan menumbuhkan kedisiplinan tinggi

- 2) Melakukan penataan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi warga sekolah berbasis kinerja
- 3) Menjalani kerja sama dengan pihak lain
- 4) Didukung oleh penerapan TIK dalam manajemen sekolah
- 5) Didukung oleh kepemimpinan/manajerial yang kuat, dan memiliki tingkat sustainsibilitas tinggi
- 6) Penguat estensi lembaga dengan melakukan sosialisasi kepada semua pihak untuk memberikan informasi dan pemahaman yang sama sehingga sekolah memperoleh dukungan secara maksimal
- 7) Meminimalkan masalah yang timbul disekolah melalui penguatan rasa kekeluargaan dan kebersamaan untuk memajukan sekolah
- 8) Memperkuat input sekolah dengan melengkapi berbagai fasilitas (perangkat keras dan lunak) manajemen sekolah agar implementasi sistem informasi manajemen berbasis TIK lebih efektif.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Komite Sekolah**

##### **a. Tujuan Dasar Pembentukan Komite Sekolah**

Menjadi penghubung antara pihak sekolah dan orang tua siswa, tentang seluruh permasalahan dan informasi yang berkaitan dengan sekolah.

b. Fungsi Utama Komite Sekolah

- 1) Pengawasan terhadap jalannya kegiatan sekolah baik secara administrasi maupun keuangan.
- 2) Penghubung yang baik antara pihak sekolah dan pihak orang tua siswa.
- 3) Pendukung setiap kegiatan sekolah yang membutuhkan baik secara moril maupun material.

**5. Komite Sekolah secara Organisasi adalah :**

- 1) Dibentuk di satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan
- 2) Dapat berbeda strukturnya satu dengan yang lain namun ada acuan yang diharapkan sama, yaitu tentang peran dan fungsi.

**6. Maksud pembentukan komite sekolah, adalah :**

- 1) Agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan
- 2) Komite sekolah yang di bentuk dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang di bangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif

**7. Komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi**

- 1) Pengguna (client model)
- 2) Berbagi kewenangan (power sharing and advocacy model)

- 3) Kemitraan (partnership model)
- 4) Difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan

## **8. Tujuan Pembentukan Komite Sekolah**

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

## **9. Peran Komite Sekolah**

- 1) Sebagai lembaga pemberian pertimbangan (advisory agency)
- 2) Sebagai lembaga pendukung (supporting agency)
- 3) Sebagai lembaga pengontrol (controlling agency)
- 4) Sebagai mediator

## **10. Fungsi Komite Sekolah**

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu

- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/orgaanisasi/dunia usaha dan dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.

#### **11. Tugas Pokok dan Fungsi Tata Usaha Sekolah**

Tata usaha sekolah adalah bagian dari unit pelaksanaan teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan informasi pendidikan di sekolah. Berdasarkan (permendiknas no 24 tahun 2008). fungsi tata usaha adalah sebagai berikut :

- a. Perencana administratif program dan anggaran
- b. Koodinator administratif program
- c. Penyusun laporan program dan anggaran
- d. Pembina staf

Tugas tata usaha sebagai tenaga adminitrasi sekolah antara lain melaksanakan :

- a. Administrasi kepegawaian
- b. Administrasi keuangan
- c. Administrasi sarana dan prasarana
- d. Administrasi kehumasan
- e. Administrasi persuratan dan kearsipan

- f. Administrasi kesiswan
- g. Administrasi layanan khusus
- h. Administrasi informasi dan komunikasi

## **12. Tugas Pokok dan Fungsi Guru**

Guru adalah sebagai sosok teladan, sosok yang dipuji dan ditiru sudah sewajarnya jika selalu ingat akan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi sebagai seorang guru, dengan demikian ketika seorang guru senantiasa memperhatikan, mengingat dan menjalankan apa yang menjadi tupoksinya maka ia berhak menyandang gelar guru profesional. Berkaitan dengan pendidikan di lembaga sekolah, ada 3 tugas pokok guru dalam pendidikan, antara lain :

### **a. Mengajar**

Mengajar mengandung arti dangkal yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Mentransfer sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswa sesuai disiplin ilmu yang diajarkan. Sasaran tugas ini adalah aspek kognitif siswa untuk melaksanakan hal ini diperlukan strategi dan metode, serta media pembelajaran yang sesuai.

### **b. Mendidik**

Mendidik termasuk tugas guru yang agak komplis dan rumit. Tugas ini berkaitan dengan sikap dan tingkah laku yang baik. Bagaimana mengubah sikap dan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Dalam satu kelas diisi oleh siswa dengan berbagai karakter dan tingkah laku. Aneka karakter yang dimiliki oleh



siswa akan dikembangkan dan diarahkan kepada karakter dan tingkah laku yang lebih baik.

### c. Melatih

Tugas guru melatih siswa tidak sama dengan seorang pelatih lainnya. Tugas guru ini sejalan dan bersifat sinergis. Saat mengajar dan mendidik, maka saat itu pula dapat dilaksanakan tugas guru sebagai pelatih. Melatih dengan berbagai kemampuan dasar yang di butuhkan oleh peserta didik. Adapun tupoksi atau tugas pokok dan fungsi seorang guru , antara lain :

- 1) Membuat program pengajaran (silabus, rpp, prota, promes)
- 2) Menganalisa materi pelajaran
- 3) Membuat lembar kerja siswa (lks)
- 4) Membuat program harian/jurnal belajar
- 5) Melaksanakan kegiatan pembelajaran
- 6) Melaksanakan kegiatan penilaian baik itu ulangan harian, tengah semester atau akhir semester
- 7) Melaksanakan analisis ulangan, program remedial, pengayaan
- 8) Mengisi daftar nilai siswa, mengisi rapot
- 9) Melaksanakan bimbingan kelas/konseling
- 10) Melaksanakan kegiatan bimbingan guru/tutor sebaya apabila telah mengikuti pelatihan
- 11) Membuat alat bantu mengajar/alat peraga
- 12) Mengikuti pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum
- 13) Melaksanakan tugas tertentu di sekolah (pks,wali kelas dll)

- 14) Membuat catatan tentang kemajuan peserta didik
- 15) Meneliti daftar hadir siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung
- 16) Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya
- 17) Menumbuhkan kembangkan sikap menghargai seni
- 18) Mengikuti kegiatan kurikulum
- 19) Mengadakan penelitian tindakan kelas
- 20) Mengumpulkan angka kredit dan menghitungnya untuk kenaikan pangkat

### **13. Definisi Siswa**

Definisi murid, siswa dan peserta didik eureka pendidik. Dunia pendidikan adalah sebuah sistem yang kompleks dan memiliki banyak unsur yang harus ada didalamnya. Salah satu unsur yang paling penting peserta didik dan juga menjadi subjek utama pendidik. Secara sederhana peserta didik adalah orang yang sedang ingin mengetahui sesuatu hal yang baru atau sedang melakukan pelajaran. Secara etimologi peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun fikiran. Sebagai individu yang tengah mengalami fase perkembangan, tertentu peserta didik tersebut masih banyak memerlukan bantuan, bimbingan dan arahan untuk menuju kesempurnaan. Hal ini dapat dicontohkan ketika seseorang peserta didik berada pada usia balita seorang selalu banyak mendapat bantuan dari

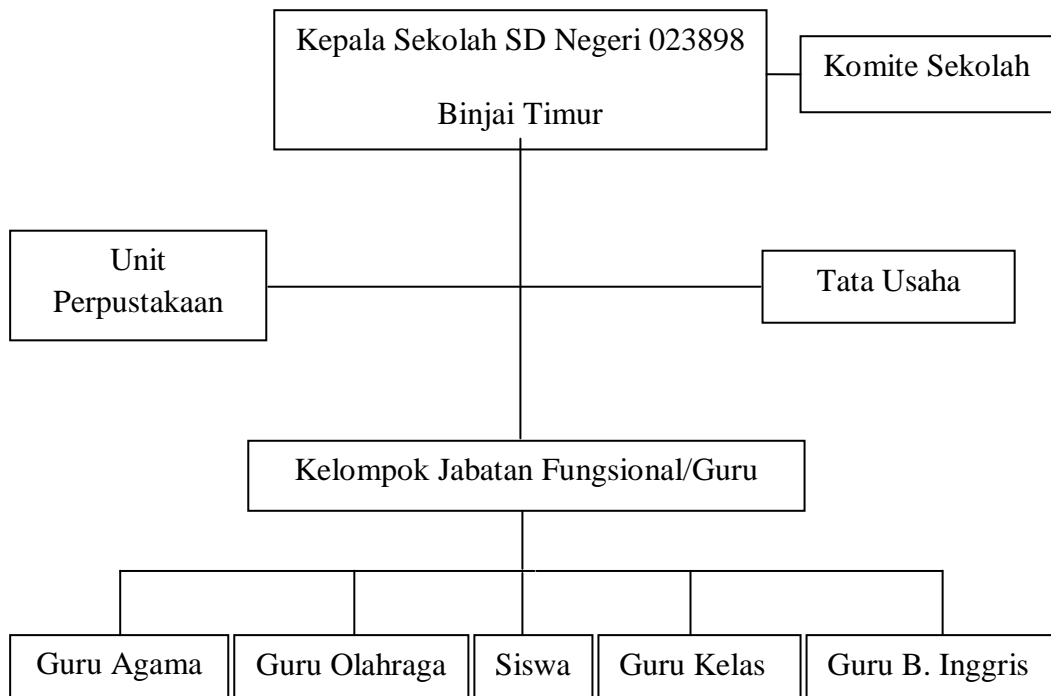
orang tua ataupun saudara yang lebih tua. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa peserta didik merupakan barang mentah (raw material) yang harus diolah dan bentuk sehingga menjadi suatu produk pendidikan. Berdasarkan hal tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa setiap peserta didik memiliki eksistensi atau kehadiran dalam sebuah lingkungan, seperti halnya sekolah, keluarga, pesantren bahkan dalam lingkungan masyarakat.

Dalam proses ini peserta didik akan banyak sekali menerima bantuan yang mungkin tidak di sadarkannya, sebagai contoh seorang peserta didik mendapatkan buku pelajaran tertentu yang ia beli dari sebuah toko peserta didik. Dapat anda bayangkan betapa banyak hal yang telah dilakukan orang lain dalam proses pembuatan dan pendistribusian buku tersebut, mulai dari pengetikan, penyetakan, hingga penjualan. Dengan diakuinya keberadaan seorang pendidik dalam konteks kehadiran dan keindividuannya, maka tugas dari seorang pendidik adalah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan kepada peserta didik menuju kesempurnaan atau kedewasaannya sesuai dengan kedewasaannya. Dalam konteks ini seorang pendidik harus mengetahui ciri-ciri dari peserta didik tersebut. Peserta didik dalam dunia pendidikan Indonesia orang yang melakukan belajar dikenal tiga nama yakni peserta didik, siswa dan murid. Ketiga nama ini memiliki masa penggunaan yang berbeda. Jika kita merujuk pada undang-undang sistem pendidikan nasional Indonesia, peserta didik digunakan sebagai orang yang menempuh jenjang pendidikan tertentu.

Adapun bagan struktur/susun organisasi sekolah SD Negeri 023898 Binjai Timur adalah sebagai berikut :

**Gambar 3.2**

**Bagan Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur**



Sumber : Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur 2016/2017

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data ini diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Kepala Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur, Tata Usaha Sekolah dasar Negeri 023898 Binjai Timur, Guru/Pengajar Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur, Orang tua siswa Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur.

##### **1. Keadaan Fisik/Gambaran Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur**

Data tentang keadaan fisik/gambaran di Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur adalah dikelompokkan dalam fasilitas sekolah, status sekolah, sarana sekolah, ketenagaan sekolah, dan data sekolah.

Adapun keadaan fisik/gambaran di Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur terkait dengan fasilitas sekolah antara lain disajikan dalam tabel berikut ini

:

**Tabel 4.1**

**Fasilitas Sekolah yang ada di Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur**

<b>Fasilitas Sekolah</b>	<b>Jumlah</b>
Ruang Kelas Belajar	6
Ruang Guru	1
UKS	1
Perpustakaan	1
Kantin	1
Labor Komputer	-
Kantor Kepala Sekolah	1

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur 2016/2017

Adapun keadaan fisik/gambaran di sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur berdasarkan Sarana Sekolah disajikan dalam table berikut ini :

**Tabel 4.2**

**Keadaan Sarana Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur**

<b>Sarana Sekolah</b>	<b>Jumlah</b>
Laptop /Notebook	-
Komputer Kantor	2
Televisi	1
Vcd/Dvd Player	1
Komputer Labor	-

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur 2016/2017

Adapun data siswa yang terdapat di Sekolah Dasar Negeri 023898 berdasarkan kelas dan jenis kelamin pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.3**

**Data siswa berdasarkan kelas dan jenis kelamin SD Negeri 023898 Binjai Timur**

<b>Kelas</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki</b>
1	13	9
2	11	11
3	15	8
4	17	9
5	16	10
6	17	8
<b>Jumlah</b>	<b>89</b>	<b>55</b>

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur 2016/2017

## **2. Data Hasil Wawancara**

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di SD Negeri 023898 Binjai Timur penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

### **a. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan peraturan pemerintah**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 pukul 09:00 wib dengan bapak Sempat Tarigan .,S.Pd (52 tahun) selaku kepala sekola SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan sudah tercapai adapun proses pencapaiannya dengan mengajak guru-guru serta pihak yang bersangkutan menjalankan kebijakan Standar Nasional Pendidikan tersebut sesuai dengan pedoman yang ada, tujuan dan sasaran yang dicapai sudah sesuai dengan peraturan kebijakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Adapun cara yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan Standar Nasional Pendidikan dengan cara memperhatikan perkembangan anak didik dan memperbaiki metode pembelajaran di kelas serta adapun kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya dengan mensosialisasikan kembali pedoman peraturan kepada guru-guru dan pihak yang bersangkutan.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 pukul 11:00 wib dengan ibu Henny Puspa Sari .,S.Pd.I (25 tahun) selaku tata usaha di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan “

Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan sudah sesuai, adapun proses pencapaiannya dengan membimbing para guru-guru agar lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya, yang sudah dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan Standar Nasional Pendidikan di sekolah ini dengan memperhatikan peningkatan mutu dan mengatasi kendala-kendala yang ada di sekolah ini. Adapun cara mengatasi kendala yang terjadi dengan mensosialisasikan kembali kepada guru-guru dan pihak yang bersangkutan terhadap kendala-kendala yang terjadi.”



Berdasarkan wawancara pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 10:00 wib dengan ibu Masriani .,S.Pd.SD (50 tahun) selaku guru di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan sudah tercapai hanya saja belum maksimal, proses pencapaiannya dengan memperhatikan perkembangan anak didik. Tujuan dan sasaran yang dicapai sudah sesuai dengan peraturan kebijakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Adapun yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan Standar Nasional Pendidikan dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru agar menerapkan Standar Nasional Pendidikan dengan lebih baik lagi, untuk mengatasi kendala atau hambatan yang terjadi pihak sekolah meningkatkan kualitas guru.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 11:00 wib dengan ibu Hasmah .,A.Ma (54 tahun) beliau mengatakan

“Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan sudah tercapai hanya saja belum maksimal, adapun proses pencapaiannya dengan memperhatikan perkembangan kemampuan belajar dan bakat siswa. Tujuan dan sasaran yang dicapai sampai saat ini sudah sesuai dengan peraturan kebijakan pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Dan yang sudah dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan Standar Nasional Pendidikan ini dengan mengubah metode pembelajaran di dalam kelas, adapun cara mengatasi kendala yang terjadi meningkatkan kualitas kinerja guru-guru serta pihak yang bersangkutan.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 14:00 wib dengan ibu Sri Ratmini (45 tahun) selaku orang tua murid di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan sudah tercapai, proses pencapaiannya dengan memperhatikan perkembangan siswa/i. Tujuan dan sasaran yang dicapai sudah sesuai dengan peraturan kebijakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan Standar Nasional Pendidikan dengan mengajak orang tua siswa/i untuk memperhatikan perkembangan anak-anaknya dalam pembelajaran yang diterimanya disekolah, adapun cara mengatasi hambatan yang ada orang tua diminta untuk mendukung dan lebih memperhatikan anak-anaknya dalam belajar.”

Dengan demikian disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sudah tercapai hanya saja belum berjalan maksimal dan masih terjadi kendala dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut. Adapun cara mengatasi kendala tersebut dengan cara mensosialisasikan kembali kepada guru-guru dan pihak yang bersangkutan terhadap kendala-kendala yang terjadi.

**b. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 pukul 09:00 wib dengan bapak Sempat Tarigan .,S.Pd. (52 tahun) selaku kepala sekolah SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Cara pemerintah menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan kepada pihak sekolah melalui dinas pendidikan dan surat kabar. Kemudian cara pihak sekolah dalam menyampaikan Standar Nasional Pendidikan yaitu melalui sosialisasi dan rapat dengan guru-guru serta pihak terkait, cara pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan guru-guru diikut sertakan dalam pelatihan peningkatan kinerja keguruan. Adapun kendala atau hambatan di SD Negeri 023898 Binjai Timur ini dalam pelaksanaan meningkatkan mutu pendidikan yang sering terjadi pada anak didik (siswa/i) yang tidak ingin tahu dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru disekolah, cara mengatasinya guru harus mengubah cara atau metode dalam menyampaikan pelajaran tersebut sehingga anak didik (siswa/i) menjadi tertarik untuk mengetahui pelajaran yang disampaikan.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 pukul 11:00 wib dengan ibu Henny Puspa Sari .,S.Pd.I (25 tahun) selaku tata usaha di SD Negeri 023898 Binjai beliau mengatakan

“Cara pemerintah menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan kepada pihak sekolah melalui surat

kabar. Kemudian cara pihak sekolah dalam menyampaikan Standar Nasional Pendidikan yaitu melalui rapat dengan guru-guru serta pihak lain yang bersangkutan dan cara pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan guru-guru diikuti sertakan dalam pelatihan peningkatan kinerja keguruan. Serta adapun kendala atau hambatan di SD Negeri 023898 Binjai Timur ini dalam pelaksanaan meningkatkan mutu pendidikan yang sering terjadi pada anak murid minat belajar yang kurang dikarenakan jenuh dengan metode yang diajarkan dan cara mengatasinya guru-guru harus mengubah metode belajar di dalam kelas sehingga anak murid semakin berminat dalam mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 10:00 wib dengan ibu Masriani .,S.Pd.SD (50 tahun) selaku guru di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Cara pemerintah menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan kepada pihak sekolah melalui surat kabar. Kemudian cara pihak sekolah dalam menyampaikan Standar Nasional Pendidikan yaitu melalui rapat dengan guru-guru serta pihak lain yang bersangkutan dan cara pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yaitu guru-guru diikuti sertakan dalam pelatihan peningkatan kinerja keguruan. Serta adapun kendala atau hambatan di SD Negeri 023898 Binjai Timur ini dalam pelaksanaan meningkatkan mutu pendidikan yang sering terjadi pada anak murid kurangnya minat belajar dan tidak fokusnya murid saat mendengar pelajaran yang disampaikan guru dikarenakan jumlah siswa yang

melebihi kapasitas kelas dan cara mengatasinya guru mengubah metode pembelajaran saat menjelaskan pelajaran serta memberi pelajaran tambahan atau les untuk mengulang kembali pelajaran sehingga anak murid dapat memahami pelajaran yang diajarkan serta mengurangi jumlah siswa dalam kelas sesuai rasio jumlah siswa perkelas.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 11:00 wib dengan ibu Hasmah .,A.Ma (54 tahun) selaku guru di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Cara pemerintah menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan kepada pihak sekolah melalui surat kabar. Kemudian cara pihak sekolah menyampaikan Standar Nasional Pendidikan yaitu melalui rapat dengan guru-guru serta pihak lain yang bersangkutan dan cara pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu guru-guru diikut sertakan dalam penelitian peningkatan kinerja keguruan. Serta adapun kendala atau hambatan di SD Negeri 023898 Binjai Timur ini dalam pelaksanaan meningkatkan mutu pendidikan yang sering terjadi pada siswa/i yang sering terjadi kurangnya minat belajar siswa/i dikarenakan jenuh dengan cara mengajar guru di dalam kelas dan cara mengatasinya dengan mengubah gaya mengajar guru di dalam kelas sehingga siswa/i tertarik untuk mendengarkan penjelasan guru.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 14:00 wib dengan ibu Sri Ratmini (45 tahun) selaku orang tua murid di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Cara pemerintah menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan kebijakan melalui rapat, kemudian cara pihak sekolah menyampaikan Standar Nasional Pendidikan dengan pihak-pihak yang terkait melalui rapat. Cara pihak sekolah melaksanakan kebijakan Standar Nasional Pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan cara memberi pelajaran tambahan di luar jam pelajaran. Adapun kendala atau hambatan di sekolah SD Negeri 023898 Binjai Timur ini dalam pelaksanaan meningkatkan mutu pendidikan yang sering terjadi pada siswa/i malas mengerjakan PR, cara mengatasinya orang tua harus menanyakan dan mendampingi saat mengerjakan PR.”

Dengan demikian disimpulkan bahwa cara pemerintah menyampaikan informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan melalui sosialisasi, dinas pendidikan, dan surat kabar, Serta cara pihak sekolah menyampaikan Standar Nasional Pendidikan kepada guru-guru dan pihak yang terkait melalui rapat. Namun saat ini dalam pelaksanaannya masih terjadi kendala, adapun cara mengatasinya dengan mengubah metode pembelajaran di dalam kelas sehingga murid dapat memahami pelajaran yang disampaikan.

**c. Adanya sikap yang bertanggung jawab dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik.**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 pukul 09:00 wib dengan bapak Sempat Tarigan .,S.Pd (54 tahun) selaku kepala sekolah SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Usaha sekolah dalam melaksanakan Standar Nasional Pendidikan yaitu guru-guru diikuti sertakan dalam kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru) di setiap kecamatan. Cara agar Standar Nasional Pendidikan dapat meningkatkan mutu disekolah ini iyalah dengan mengadakan rapat guru-guru dan membahas tentang kurikulum dan kendala apa yang terjadi saat pembelajaran dikelas, adapun cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri 023898 Binjai Timur yaitu dengan cara diadakan kegiatan tambahan belajar di luar jam belajar jika ada kendala-kendala di dalam kelas. Adapun sikap yang bertanggung jawab dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu guru harus menjalankan pelatihan keguruan agar dapat menerapkan hasil pelatihan disekolah dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 pukul 11:00 wib dengan ibu Henny Puspa Sari .,S.Pd.I (25 tahun) selaku tata usaha di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan “

Usaha sekolah dalam melaksanakan Standar Nasional Pendidikan yaitu dengan cara melengkapi fasilitas yang kurang di sekolah dan guru-guru diikuti sertakan dalam pelatihan kinerja keguruan. Cara agar Standar Nasional Pendidikan dapat meningkatkan mutu disekolah ini iyalah dengan mengadakan rapat untuk membahas kurikulum dan cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri 023898 Binjai Timur dengan cara diadakannya kegiatan tambahan belajar diluar jam belajar jika ada kendala-kendala di dalam kelas. Adapun sikap yang bertanggung jawab dari pihak

sekolah terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu guru-guru mengikuti pelatihan keguruan diharapkan dapat diterapkan saat mengajar di sekolah.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 09:00 dengan ibu Masriani .,S.Pd.SD (50 tahun) selaku guru di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Usaha sekolah dalam melaksanakan Standar Nasional Pendidikan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas kinerja keguruan disekolah. Cara agar Standar Nasional Pendidikan dapat meningkatkan mutu di sekolah ini iyalah dengan mengevaluasi setiap kekurangan dari standar-standar yang telah ada dan diperbaikinya dan adapun cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri 023898 Binjai Timur yaitu dengan guru-guru memotivasi anak didik dalam belajar di dalam kelas maupun dirumah. Adapun sikap yang bertanggung jawab dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan sesuai peraturan pemerintah yaitu sekolah terus update tentang segala peraturan dan Standar Nasional Pendidikan agar sekolah dapat berkembang maju sesuai jaman.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 11:00 wib dengan ibu Hasmah .,A.Ma (54 tahun) selaku guru di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Usaha sekolah dalam melaksanakan Standar Nasional Pendidikan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas kinerja keguruan disekolah. Cara agar Standar Nasional Pendidikan dapat meningkatkan mutu disekolah ini iyalah dengan



mengevaluasi setiap kekurangan dari standar-standar yang telah ada dan diperbaikinya dan adapun cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri 023898 Binjai Timur yaitu dengan guru-guru mengarahkan anak didik dalam belajar di dalam kelas dan dirumah. Adapun sikap yang bertanggung jawab dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan sesuai peraturan pemerintah yaitu sekolah harus terus meningkatkan kualitas kinerja guru-guru pengajar.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 14:00 wib dengan ibu Sri Ratmini (45 tahun) selaku orang tua murid di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Usaha sekolah dalam melaksanakan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di sekolah ini dengan mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan pelajaran anak-anaknya, adapun cara agar kebijakan Standar Nasional Pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini dengan cara memberi pelajaran tambahan diluar jam pelajaran. Tanggung jawab pihak sekolah atas mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Standar Nasional ini dengan mengubah cara belajar dalam kelas, sikap dan tanggung jawab sekolah dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan agar sesuai dengan peraturan pemerintah dengan meningkatkan kualitas guru.”

Dapat disimpulkan bahwa adanya sikap yang bertanggung jawab pihak sekolah terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu dengan cara guru diikut sertakan dalam pelatihan keguruan agar dapat menerapkan hasil pelatihan disekolah dengan baik, walaupun

masih ada kendala dalam pelaksanaannya, cara pihak sekolah mengatasinya dengan mengadakan rapat kepada guru-guru dan membahas tentang kurikulum serta kendala yang terjadi di dalam kelas.

**d. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 pukul 09:00 dengan bapak Sempat Tarigan .,S.Pd (52 tahun) selaku kepala sekolah SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan sekolah ini menggunakan pedoman yang diberikan dari pemerintah adapun cara pelaksanaan pedoman Standar Nasional Pendidikan di sekolah ini sudah dijalankan semaksimal mungkin dan sudah diterapkan oleh guru-guru saat mengajar serta tanggapan atau respon dari pihak yang terkait menerima pelaksanaan pedoman Standar Nasional Pendidikan dengan baik, seharusnya pemerintah juga harus terus memperhatikan pendidikan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pedoman Standar Nasional Pendidikan masih ada sedikit kendala yang terjadi, adapun saran beliau agar pedoman dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan haruslah pengaturan awal di tuntaskan sebelum pengaturan baru dikeluarkan dan harus di sosialisasikan.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 pukul 11:00 wib dengan ibu Henny Puspa Sari .,S.Pd.I (25 tahun) selaku tata usaha di SD Negeri 023898 Binjai timur beliau mengatakan

“Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan memiliki pedoman dalam pelaksanaannya dan cara pelaksanaannya di mulai saat guru mulai mengajar anak murid di dalam kelas. Adapun tanggapan atau respon dari pihak yang terkait di terima dengan cukup baik. Dalam pelaksanaan pedoman Standar Nasional Pendidikan masih ada sedikit kendala yang terjadi, saran beliau dalam pelaksanaan pedoman Standar Nasional Pendidikan ini sebelum menerapkan pengaturan baru seharusnya pengaturan lama di tuntaskan dulu dan pengaturan baru disosialisasikan lagi.”

Berdasarkan wawancara pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 10:00 wib dengan ibu Masriani .,S.Pd.SD (50 tahun) selaku guru di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan yang di terapkan di sekolah ini, Adapun cara pelaksanaan pedoman ini dengan cara mengubah metode pembelajaran agar anak murid lebih mengerti dan memahami pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Dalam pelaksanaan pedoman ini masih ditemui sedikit kendala, saran beliau dalam pelaksanaan pedoman Standar Nasional Pendidikan ini sebelum menerapkan pedoman baru seharusnya pedoman lama dituntaskan dengan baik barulah pedoman baru disosialisasikan.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2011 pukul 11:00 wib dengan ibu Hasmah .,A.Ma (54 tahun) selaku guru di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dijalankan disekolah ini sesuai pedoman yang telah ada dan pelaksanaannya dimulai dengan memberikan

masukan terhadap guru-guru untuk mengubah metode pembelajaran sesuai dengan pedoman Standar Nasional Pendidikan. Adapun tanggapan atau respon dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan pedoman Standar Nasional Pendidikan di terima dengan baik dan sampai saat ini masih ada sedikit hambatan yang dihadapi. Saran beliau dalam pelaksanaan pedoman ini agar dapat di jalan lebih baik lagi sehingga sekolah ini dapat selalu meningkatkan mutu pendidikan di setiap tahunnya.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 14:00 wib dengan ibu Sri Ratmini (45 tahun) selaku orang tua murid di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di jalankan di sekolah ini sesuai pedoman yang telah ada dan pelaksanaan di sesuai kan dengan pedoman yang ada. Adapun tanggapan atau respon dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan pedoman Standar Nasional Pendidikan di terima dengan baik dan sampai saat ini masih ada sedikit hambatan yang dihadapi. Saran beliau dalam pelaksanaan pedoman ini agar dapat di jalan lebih baik lagi.”

Dengan demikian disimpulkan bahwa dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan sekolah ini menggunakan pedoman yang diberikan pemerintah dan cara pelaksanaan peraturan pemerintah di sekolah ini sudah sesuai dengan pedoman Standar Nasional Pendidikan. Dalam pelaksanaan pedoman Standar Nasional Pendidikan masih adanya kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya dengan mensosialisasikan kembali pedoman peraturan Standar Nasional Pendidikan tersebut kepada guru-guru dan pihak yang bersangkutan.

**e. Adanya sarana dan fasilitas pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan**

Berdasarkan hasil wawancara hari senin tanggal 13 Maret 2017 pukul 09:00 wib dengan bapak Sempat Tarigan .,S.Pd (52 tahun) selaku kepala sekolah SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Sarana dan fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan sudah berjalan dengan baik dan peran sarana dan fasilitas yang diberikan pemerintah cukup berperan baik dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan. Adapun kondisi sarana dan fasilitas dalam melaksanakan Standar Nasional Pendidikan di sekolah ini cukup baik dan penggunaan sarana dan fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan harapan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dikarenakan ketepatan waktu yang telah ditentukan belum sesuai dengan harapan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 pukul 11:00 wib dengan ibu Henny Puspa Sari .,S.Pd.I (25 tahun) selaku tata usaha di SD Negeri 023898 Binjai Timur mengatakan

“Sarana dan fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan sudah berjalan dengan efektif, peran sarana dan fasilitas sudah cukup berperan baik dalam membantu pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Adapun kondisi sarana dan fasilitas yang diberikan cukup baik serta penggunaan sarana dan fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah belum sesuai yang diharapkan.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 10:00 wib dengan ibu Masriani .,S.Pd.SD (50 tahun) selaku guru di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Sarana dan fasilitas pendukung yang telah diberikan pemerintah dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan sudah berjalan dengan baik, peran sarana dan fasilitas sudah cukup berperan baik dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Adapun kondisi sarana dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di sekolah ini cukup baik serta penggunaan sarana dan fasilitas pendukung yang telah diberikan pemerintah belum sesuai harapan sekolah.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 11:00 wib dengan ibu Hasmah .,A.Ma (54 tahun) selaku guru di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Sarana dan fasilitas pendukung yang diberikan sudah berjalan dengan baik, peran sarana dan fasilitas sudah cukup membantu hanya saja bantuannya tidak tepat waktu. Adapun kondisi sarana dan fasilitas Standar Nasional Pendidikan cukup baik serta penggunaan sarana dan fasilitas pendukung yang telah diberikan pemerintah belum sesuai harapan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini.”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 14:00 wib dengan ibu Sri Ratmini (45 tahun) selaku orang tua murid di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan

“Sarana dan fasilitas pendukung yang diberikan sudah di jalankan dengan baik, peran sarana dan fasilitas sudah membantu. Adapun kondisi sarana dan fasilitas Standar Nasional Pendidikan cukup baik serta penggunaan sarana dan fasilitas pendukung yang telah diberikan pemerintah belum sesuai harapan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini.”

Dengan demikian disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah sudah dijalankan dengan baik oleh pihak sekolah. Sarana dan fasilitas berperan baik dalam membantu berjalannya peraturan pemerintan nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di sekolah ini hanya saja waktu yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

### **1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan peraturan pemerintah**

Wahab (2005:135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sudah tercapai hanya saja belum maksimal dikarenakan masih adanya kendala yang menghambat.

Hal ini dibuktikan sebagaimana hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 11:00 wib dengan ibu Hasmah .,A.Ma (54 tahun) beliau mengatakan “Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan sudah tercapai hanya saja belum begitu maksimal. Adapun cara mengatasi kendala yang terjadi dengan meningkatkan kualitas kinerja guru-guru serta pihak yang bersangkutan”.

Dengan demikian tujuan dan sasaran kebijakan peraturan dapat dicapai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

## **2. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.**

Widodo (2011:97) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan haruslah sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini dibuktikan sebagaimana hasil wawancara pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 pukul 09:00 wib dengan bapak Sempat Tarigan .,S.Pd. (52 tahun)



selaku kepala sekolah SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan “Cara pemerintah menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan kepada pihak sekolah melalui dinas pendidikan dan surat kabar. Kemudian cara pihak sekolah dalam menyampaikan Standar Nasional Pendidikan yaitu melalui sosialisasi dan rapat dengan guru-guru serta pihak terkait

Dengan demikian dapat disimpulkan cara pemerintah menyampaikan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan masih perlu adanya pembinaan dan sosialisasi agar keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan.

### **3. Adanya sikap yang bertanggung jawab dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik.**

Widodo (2011:98) mengemukakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai secara efektif maka implementasi kebijakan publik tersebut tidak akan efektif.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa sikap yang bertanggung jawab dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik haruslah efektif sehingga pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dapat terlaksana dengan sesuai yang diharapkan.

Hal ini dibuktikan sebagaimana hasil wawancara pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 pukul 11:00 wib dengan ibu Henny Puspa Sari .,S.Pd.I (25 tahun) selaku tata usaha di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan “Usaha sekolah dalam melaksanakan Standar Nasional Pendidikan yaitu dengan cara melengkapi fasilitas yang kurang di sekolah dan guru-guru diikut sertakan dalam pelatihan kinerja keguruan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap yang bertanggung jawab dari sekolah terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan sudah sesuai dengan pedoman atau petunjuk yang telah digariskan dalam Standar operasional Prosedure (SOP).

#### **4. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.**

Menurut Nugroho (2008:36) Kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sangatlah berperan penting dalam pelaksanaan Standar Nasional di sekolah ini.

Hal ini dibuktikan sebagaimana hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2011 pukul 11:00 wib dengan ibu Hasmah .,A.Ma (54 tahun) selaku guru di SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan “Dalam pelaksanaan

Standar Nasional Pendidikan dijalankan disekolah ini sesuai pedoman yang telah ada dan pelaksanaannya dimulai dengan memberikan masukan terhadap guru-guru untuk mengubah metode pembelajaran sesuai dengan pedoman Standar Nasional Pendidikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan sudah sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan yang diberikan pemerintah. Hanya saja harus di sosialisasikan kembali peraturan pedoman tersebut sehingga dapat diterapkan oleh guru-guru dengan lebih baik lagi.

#### **5. Adanya sarana dan fasilitas pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.**

Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai “to provide the means for carryng out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give pratical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa sarana dan fasilitas pendukung yang diberikan dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan.

Hal ini dibuktikan sebagaimana hasil wawancara hari senin tanggal 13 Maret 2017 pukul 09:00 wib dengan bapak Sempat Tarigan .,S.Pd (52 tahun)

selaku kepala sekolah SD Negeri 023898 Binjai Timur beliau mengatakan “sarana dan fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan sudah berjalan dengan baik. Adapun kondisi sarana dan fasilitas dalam melaksanakan Standar Nasional Pendidikan di sekolah ini cukup baik dan penggunaan sarana dan fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan harapan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dikarenakan ketepatan waktu yang telah ditentukan belum sesuai dengan harapan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.”

Dapat disimpulkan dengan adanya sarana dan fasilitas pendukung yang diberikan dapat membantu berjalannya pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di sekolah ini. Walaupun sarana dan fasilitas yang diberikan belum sesuai dengan yang di harapkan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

### **C. Analisis Kesimpulan Kategorisasi**

Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara yang dilakukan dengan para narasumber dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri Negeri 023898 Binjai Timur dengan mengikuti aturan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mana dalam peraturan pemerintah tersebut Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri 023898 Binjai Timur sudah berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut hanya saja belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan masih adanya kendala yang menghambat dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di sekolah ini, adapun kendala-

kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan adalah kurangnya kualitas kinerja guru baru dalam menyampaikan pelajaran di dalam kelas sehingga anak didik mudah bosan atau jenuh dengan metode pembelajaran yang di sampaikan di dalam kelas, jumlah siswa dalam kelas yang melebihi kapasitas, dan terlambatnya sarana dan fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri 023898 Binjai Timur yaitu dengan mensosialisasikan kembali pedoman peraturan Standar Nasional Pendidikan kepada guru-guru dan pihak yang bersangkutan, mengubah metode pembelajaran di dalam kelas sehingga anak didik tertarik mendengarkan pelajaran yang sedang disampaikan guru, guru-guru diikut sertakan dalam pelatihan keguruan guna meningkatkan kualitas kinerja guru dan meningkatkan mutu pendidikan setiap tahunnya di SD Negeri 023898 Binjai Timur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti disajikan dan dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur, dalam pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sudah berjalan dengan cukup baik.

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur telah dijalankan dengan cukup baik. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yang pertama, adanya tujuan dan sasaran kebijakan peraturan pemerintah dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dapat dijalankan atau dilaksanakan di SD Negeri 023898 Binjai Timur sehingga mutu pendidikan di sekolah ini dapat meningkat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Kedua, adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, dalam penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan kepada pihak-pihak

sekolah sekecamatan termasuk Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur sehingga Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dapat dijalankan di sekolah.

Ketiga, adanya sikap yang bertanggung jawab dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik, dalam hal ini pihak sekolah ikut melaksanakan dan mendukung terhadap Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yaitu dengan cara guru harus menjalankan pelatihan keguruan agar dapat menerapkan hasil pelatihan disekolah dengan baik.

Keempat, adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, dalam hal ini pedoman atau aturan-aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tersebut sudah di terapkan di sekolah ini dan semaksimal mungkin dilaksanakan dalam pencapaian meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini.

Kelima, adanya sarana dan fasilitas pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, dalam hal ini sarana dan fasilitas pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 telah diberikan pemerintah melalui Dinas Pendidikan, seperti pengadaan buku teks pelajaran, pemberian pelatihan kepada guru dan pengadaan keperluan yang dibutuhkan sekolah dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dengan demikian kelima kategorisasi tersebut dapat telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan sudah diterapkan di Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 di Sekolah Dasar Negeri 023898 Binjai Timur, hendaknya penyampaian kebijakan melalui Dinas Pendidikan harus lebih di sosialisasikan agar guru-guru lebih dapat memahami dari kebijakan yang dibuat pemerintah dan dapat diterapkan di sekolah serta pengawasan sesering mungkin dilakukan agar Standar Nasional Pendidikan dapat terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. Seharusnya Kepala Sekolah dan seluruh guru yang ada di SD Negeri 023898 Binjai Timur meningkatkan kerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mencerdaskan anak didiknya.
3. Hendaknya para guru memberikan motivasi dalam meningkatkan kualitas belajar anak didiknya sehingga mutu pendidikan di SD Negeri 023898 Binjai Timur dapat meningkat sesuai yang diharapkan.
4. Sebaiknya para guru mengikuti pelatihan peningkatan kinerja guru agar dapat mengembangkan potensi dan kualitas guru dalam pembelajaran di dalam kelas sehingga meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 023898 Binjai Timur.
5. Hendaknya pemerintah meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 023898 Binjai Timur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012 : *Kebijakan Publik*, Penerbit Salemba, Jakarta.
- Agustino, leo. 2006 : *Politik Dan Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- Agustino,leo. 2008 : *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Amin, Zulkifli, dan Nur, Zaharuddin. 2010 : *Pengantar Pendidikan*, Dalam Diktat UMSU, Medan.
- Amri, Sofan. 2013 : *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010 : *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2012 : *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Depdiknas. 2005 : *KBBI*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dunn, Wiliam N. 2003 : *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University Press, Jakarta.
- Dye, Thomas R. 2005 : *Kebijakan Dan Kebijakan Publik*, Rosdakarya, Bandung.
- Garvin & Davis. 2005 : *Manajemen Mutu Terpadu*, Terjemahan M.N Nasution. Erlangga
- Islamy, Irfan. 2003 : *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007 : *Penelitian Kualitatif*, Mandar Maju, Jakarta

Nugroho Riant dan Tilaar, H.A.R 2008 : *Kebijakan Pendidikan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta

Solly. 2007 : *Kebijakan Publik*, Maju Mundur, Bandung.

Subroto, Suryo, B. 2004 : *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Rineke Cipta, Jakarta.

Susilo, Hartandi. 2007 : *Analisis Kebijakan Publik Dewasa Ini*, Aksara Baru, Jakarta.

Tachjan, Dr.H, M.Si. 2006 : *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung

Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo. 2005 : *Pengantar Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2005 : *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2008 : *Analisis kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta

Widodo, Joko. 2011 : *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing, Malang.

Winarno, Budi. 2010 : *Kebijakan Publik*, Caps, Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2002 : *Teori Dan proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

### **Internet**

<http://papaochad.blogspot.co.id/2011/06/mutu-pendidikan.html>